

ORIENTASI PRODUKSI DALAM PENGURANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

Production Orientation within Poverty Reduction in Indonesian

Ivanovich Agusta^{*)}, Endriatmo Soetarto, Djuara P. Lubis, Irwan Abdullah

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

**) Email : ivanagusta@yahoo.com*

Diterima 21 November 2011 / Disetujui 11 September 2012

ABSTRACT

The biggest discourse on poverty is laid on production process metaphor. The discourse is built from dicotomies of rich-poor, productive-unproductive, local-global organization. The discourse is built by global institution, and implemented to national, regional, and village levels. The discourse is built by standardization, normalization, and discipline. Formalization of habitus is built by training and formal paper. Field of discourse contains poor people, their family, beneficiaries, micro enterprise, and villagers. According to construction of the field, poverty reduction program should benefit specifically for poor people and family.

Keywords: *discourse, dicotomies, habitus of poverty, field of poverty reduction.*

ABSTRAK

Diskursus kemiskinan terbesar saat ini diletakkan di atas metafora proses produksi. Diskursus terbangun dari pemikiran dikotomis, yaitu dikotomi kaya-miskin, produktif-tidak produktif, organisasi lokal-global. Diskursus ini dibangun oleh lembaga global, dan diimplementasikan pada tingkat nasional, daerah, hingga desa. Diskursus tersebut dibangun melalui standarisasi, normalisasi, dan pendisiplinan. Formalisasi diskursus dilaksanakan melalui pelatihan dan penyusunan dokumen-dokumen formal. Arena diskursus berisikan orang miskin, keluarga mereka, pemanfaat, pengusaha mikro, dan orang desa. Dengan konstruksi demikian, program pengurangan kemiskinan seharusnya menentukan secara khusus pemanfaatnya adalah orang miskin dan keluarganya.

Kata kunci: diskursus, dikotomi, habitus kemiskinan, arena pengurangan kemiskinan.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Diskursus kemiskinan menguat dan melemah dalam rangkaian tema-tema pembangunan Indonesia. Penelitian ini mengkaji diskursus kemiskinan kontemporer yang kini sangat kuat, namun juga mempelajari masa lalu yang memiliki hubungan dengan pembentukan dan perubahan makna kemiskinan saat ini.

Pengorganisasian secara resmi penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional muncul pada tahun 1993, pada saat disusun Program Penanggulangan Kemiskinan¹. Selanjutnya kemiskinan selalu ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja pembangunan di pusat dan daerah, dan hal tersebut berlangsung hingga kini. Dimensi kekuasaan dalam diskursus ditunjukkan oleh penggunaan tingkat kemiskinan sebagai acuan

alokasi sumberdaya pembangunan, sebagaimana ditunjukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan 2009-2014, serta penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin untuk penghitungan alokasi anggaran ke daerah. Penguatan diskursus juga ditunjang kepopuleran kemiskinan dalam dialog antar pihak. Pengkritik pemerintah juga menggunakan isu kemiskinan sebagai pokok bahasan, sebagaimana kelompok tokoh agama menyebut kenyataan kemiskinan sehari-hari sebagai kebohongan pernyataan penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah.

Penguatan diskursus bukan sekedar sebagai konsekuensi praktik penanggulangan kemiskinan di dalam negeri, melainkan praktik ini telah terorganisasi secara global (Levinsohn, 2003; Rahnema, 1992; World Bank, 2000). Lembaga donor internasional, terutama yang berkaitan dengan pembangunan negara dunia ketiga, menggunakan tingkat kemiskinan dan proses penanggulangannya sebagai faktor penetapan alokasi pendanaan.

¹Inpres nomor 5 tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan.

Sebelum dianalisis dengan teori diskursus, pemikiran dan praktik penanggulangan kemiskinan dipandang sepenuhnya positif dan sama-sama disetujui oleh pemerintah, swasta, lembaga kemasyarakatan, akademisi dan pihak lain. Perdebatan hanya berlangsung dalam aspek esensi kemiskinan: siapa orang miskin dan jumlah orang miskin. Anomali berupa perbedaan hasil kajian berbasis statistika nasional dan studi kasus lokal, penolakan sebagian masyarakat adat terhadap program penanggulangan kemiskinan, sulit dijelaskan lebih lanjut, sehingga tidak mengubah pemikiran dan praktik penanggulangan kemiskinan.

Akan tetapi analisis diskursus membuka peluang perbedaan yang nyata di antara berbagai makna kemiskinan. Lebih jauh lagi, analisis diskursus juga membuka peluang kajian permainan kekuasaan dalam penentuan definisi golongan miskin, jumlahnya dan lokasinya (Ananta, 2005 dan Gouda, 2007). Oleh sebab itu, penelitian kali ini menggunakan teori diskursus, penggunaan kekuasaan, dan analisis terhadap praktik penanggulangan kemiskinan.

Masalah dan Tujuan Penelitian

Dengan menyadari keberadaan berbagai diskursus kemiskinan, perlu dipelajari proses pembentukan diskursus tersebut. Berkaitan dengan itu, rumusan masalah penelitian kali ini ialah, bagaimana proses kemunculan diskursus kemiskinan di Indonesia. Setelah suatu diskursus kemiskinan terbentuk, terdapat konsekuensi untuk mempraktikkan diskursus tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu rumusan permasalahan berikutnya ialah, bagaimana kekuasaan digunakan untuk mengelola orang miskin.

Kecenderungan kajian ilmu sosial mutakhir telah menempatkan pentingnya orientasi tujuan. Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai ialah menjelaskan hubungan yang terjalin antara diskursus, kekuasaan dan praktik pada diskursus kemiskinan.

PENDEKATAN TEORETIS

Teori Diskursus dan Praktik Sosial

Analisis sosiologis dapat dilakukan dalam tataran diskursus, refleksif, struktur sosial, dan pengelolaan benda-benda (Foucault, 2002a, 2002b, 2002c). Belum ditemui teori sosiologi yang membicarakan sekaligus keempat tataran tersebut. Oleh sebab itu dalam penelitian ini digabungkan teori diskursus dari Foucault dan teori sosiologi dari Bourdieu. Meskipun Foucault telah menunjukkan seluruh tataran analisis ilmu sosial tersebut, namun ia hanya mengembangkan secara mendalam teori diskursus. Adapun Bourdieu (1977, 1990, 2010) menyetujui analisis diskursus Foucault, namun lebih banyak mengembangkan tataran refleksif dan interaksi sosial. Keduanya sama-sama mengkaji susunan benda-benda, dalam kaitannya dengan tataran analisis di atas. Keduanya juga bersepakat dalam paham filosofis diskontinuitas dalam perkembangan ilmu pengetahuan, mengembangkan orientasi teori pada praktik sehari-hari, menyepakati konsep predisposisi sebagai refleksi individu sebelum bertindak, dan

munculnya kekuasaan secara inheren dalam interaksi sosial.

Teori diskursus telah dikembangkan oleh banyak ahli, diantaranya Foucault, Habermas, Laclau dan Mouffe. Dibandingkan teori diskursus lainnya, karya Foucault memiliki metode yang lengkap, dan telah dipraktikkan pada berbagai bidang, termasuk dalam kritik pembangunan dan kemiskinan.

Pada tataran refleksif, Bourdieu menyatakan bahwa dalam diri agensi terwujud predisposisi sikap untuk melakukan tindakan, yang dinamakannya habitus. Interaksi sosial antar agensi terstrukturkan dalam suatu arena. Konsep agensi digunakan untuk menunjukkan kemampuannya membentuk struktur, sekaligus kenyataan bahwa dirinya turut dipengaruhi oleh struktur sekelilingnya. Dalam arena tersebut, hubungan antar agensi secara empiris didorong oleh habitus dan berbagai modal yang dimilikinya. Modal tersebut dapat dirumuskan sebagai modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik.

Tabel 1. Kesetaraan Analisis antara Foucault dan Bourdieu

Tataran Analisis Sosiologi	Konsep Foucault	Konsep Bourdieu
Diskursus	Diskursus	Diskursus
Refleksif	Refleksif	Habitus
Struktur sosial	Lembaga	Arena
Susunan benda-benda	Susunan benda-benda	Modal ekonomi

Sebenarnya Foucault sempat menuliskan hubungan antara diskursus dan lembaga sosial. Dengan membandingkan kesamaan tataran analisis, konsep lembaga menurut Foucault setara dengan arena menurut Bourdieu (Tabel 1).

Suatu interaksi, baik berupa interaksi sosial dalam arena atau lembaga, maupun interaksi antar diskursus, dijelaskan sebagai suatu strategi. Konsep ini digunakan karena persis pada saat interaksi berlangsung, maka turut serta kekuasaan yang dilimpahkan dari satu agensi, struktur atau diskursus kepada pihak lainnya. Di sini kekuasaan tidak didefinisikan sebagai semacam entitas tersendiri atau terstruktur hanya pada lembaga politik, namun lebur dalam setiap interaksi.

Perpaduan teori diskursus Foucault dan teori sosiologi Bourdieu dapat disusun dengan menempatkan diskursus sebagai konteks yang mendasari keseluruhan refleksi dan tindakan sosial sebagaimana dijelaskan pada gambar 1 di bawah ini. Interaksi sosial antar agensi dapat digambarkan sebagai hubungan antar habitus dalam suatu arena. Sementara habitus bersifat subyektif, arena memiliki sifat obyektif dan terstruktur secara lebih ketat. Berbagai jenis modal turut mendorong interaksi empiris antar habitus. Hubungan interaktif tersebut berlangsung sebagai suatu jaringan sosial, meskipun melewati struktur yang hierarkis. Interaksi berlangsung

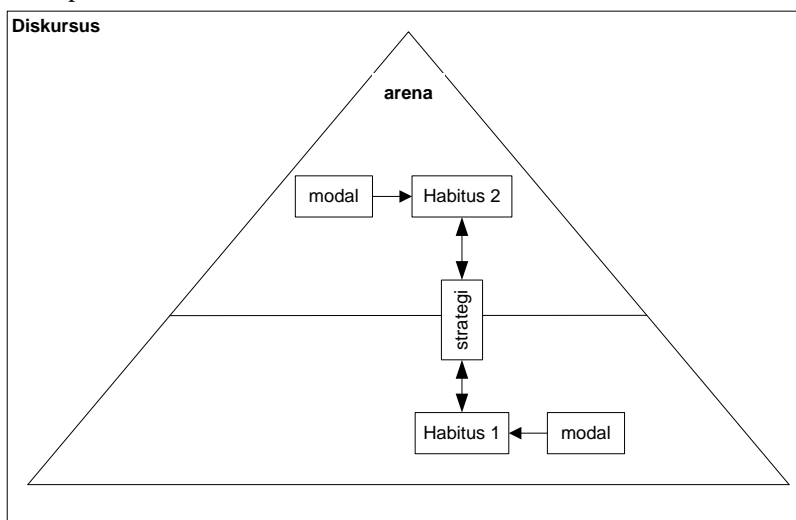
dalam suatu strategi yang melibatkan kekuasaan antar agensi.

KERANGKA PEMIKIRAN

Ada baiknya membedakan ranah penelitian diskursus pada pembentukan diskursif, praktik pelembagaan diskursus dan penguasaan kekuasaan, serta pengembangan disposisi agensi. Penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan praktik suatu diskursus

tidak berharga, informasi tentang tubuh orang miskin, serta informasi wilayah yang menjadi tempat tinggal orang miskin

Responden meliputi kepala subdirektorat Kementerian yang mengelola program kemiskinan nasional, tim teknis dalam subdirektorat tersebut dan konsultan di tingkat nasional. Informan meliputi pengamat ilmu sosial tentang kemiskinan.



Gambar 1. Perpaduan Teori Diskursus dan Teori Praktik Sosial

kemiskinan melalui kajian dalam arena sosial tertentu (proses sirkulasi diskursus). Sirkulasi diskursus berlaku sebagai pola pikir, aturan interaksi sosial, dan aturan penyusunan benda-benda sesuatu dengan diskursus kemiskinan yang berlaku.

Hubungan antara suatu kesatuan diskursus kemiskinan dengan benda-benda bersifat sirkuler. Setelah benda-benda yang terkait dengan kemiskinan dan penanggulangannya diatur susunannya oleh kelembagaan sosial, selanjutnya aspek fisik dari benda tersebut mempengaruhi keadaan kesatuan diskursus kemiskinan yang dianut.

METODE

Penelitian diselenggarakan di Jakarta pada bulan Maret-Agustus 2011. Data yang dikumpulkan mencakup:

1. Pernyataan yang memungkinkan analisis diskursus tentang orang miskin, mobilitas sosial, dan penggunaan benda-benda fisik di lingkungan tersebut. Data pernyataan diperoleh dokumen yang berisikan pemikiran, ilmu pengetahuan, kebijakan, dan peraturan perundangan tentang kemiskinan.
2. Refleksi pelaku. Data yang hendak diperoleh meliputi riwayat hidup responden, tindakan yang diharapkan (predisposisi), kejadian penting dalam dalam kehidupannya
3. Aturan, interaksi sosial, organisasi yang membatasi atau menguatkan orang miskin. Data diperoleh dari substansi program dan proyek penanggulangan kemiskinan, organisasi atau aturan lokal yang diciptakan, serta pengembangan kelompok dan organisasi
4. Benda-benda yang dipandang penting bagi orang miskin. Data yang diambil meliputi benda berharga dan

Data sekunder meliputi data statistika, kebijakan dan peraturan perundangan, literatur pemikiran atau evaluasi kemiskinan, dan aturan-aturan kelembagaan. Melalui metode analisis dokumen, seluruh data sekunder yang penting, banyak dikutip, dan diperbincangkan berkaitan dengan kemiskinan di Indonesia dipelajari. Tulisan-tulisan tersebut menjadi awal bagi penyusunan suatu diskursus kemiskinan. Tulisan-tulisan yang koheren dijadikan bahan pembentuk satu diskursus. Dokumen dikelompokkan menurut tipe diskursus kemiskinan yang dikaji, yaitu diskursus kemiskinan produksi. Disamping tulisan-tulisan yang koheren, juga dikaji tulisan-tulisan lain yang menunjukkan anomali atau hingga perbedaan dari kelompok tulisan lainnya. Tulisan-tulisan semacam ini dijadikan bahan kajian pembentukan diskursus kemiskinan lainnya.

Untuk mendapatkan pernyataan yang mampu menjelaskan kehadiran (*emergence*) diskursus kemiskinan tertentu, wawancara mendalam menduduki posisi penting. Wawancara mendalam dilaksanakan untuk mendapatkan data pernyataan, predisposisi agensi sebagai suatu habitus, proses interaksi dalam bentuk lintasan, dan strategi dengan agensi lain dalam arena-arena kemiskinan. Wawancara mendalam dilaksanakan terhadap seluruh responden dan informan.

Peneliti juga mengamati kegiatan penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional. Pengamatan dilakukan terhadap pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan di tingkat nasional. Unit analisis dalam penelitian ini berupa:

1. Pernyataan, digunakan dalam melaksanakan analisis pada tataran diskursus kemiskinan;

2. pengalaman hidup, digunakan dalam melaksanakan analisis pada tataran reflektif yang subyektif;
3. relasi social, digunakan dalam melaksanakan analisis pada tataran struktur sosial obyektif.

Analisis diskursus berusaha memahami dan menerangi tindakan dari kejanggalan yang terjadi dengan mempergunakan kekuasaan untuk menegaskan makna yang dominan (Foucault, 2002c). Tahapan analisis data sebagai berikut:

1. analisis pembentukan untuk masing-masing diskursus kemiskinan: mendefinisikan obyek diskursus (tipe kemiskinan, tindakan sosial, dan benda-benda yang khas), mendefinisikan sekelompok pernyataan dan tindakan, menganalisis posisi agensi dan lembaga yang telah mapan dalam diskursus kemiskinan tertentu, analisis modalitas penyampaian atau komunikasi, mengelompokkan dan menyusun relasi antar data yang ditemukan;
2. analisis pengelolaan diskursus: menentukan arena yang digunakan dalam suatu diskursus kemiskinan, menentukan agensi dan berbagai posisi sosial, mengamati struktur obyektif dalam arena, yaitu berbagai tindakan yang terpola, menggali habitus dari riwayat hidup agensi yang dipandang penting dalam arena kemiskinan, menganalisis pola hubungan antar posisi dalam hierarki yang berbeda;
3. analisis kejanggalan: menggali pengecualian (*exclusion*) yang dirasakan oleh agensi dibandingkan aturan yang ada, menyusun deskripsi karakteristik tempat pengecualian tersebut lahir.
4. analisis kontradiksi: menggali kemampuan diskursus kemiskinan tertentu untuk mengelola kritik, menggali proses perubahan fondasi diskursus menjadi konflik dalam diskursus yang bersangkutan;
5. melakukan proses penyimpulan yang tepat di lapangan (Alvesson dan Sköldbberg, 2000). Selanjutnya peneliti memutuskan manakah pihak-pihak di dalam kelompok tersebut yang menjadi kehilangan atau sebaliknya semakin kuat suaranya dalam kategori baru yang dibangun;
6. untuk menghasilkan laporan lapangan yang sesuai, maka peneliti mendiskusikan, berdebat dan berkompromi dengan masing-masing responden dan informan, dalam rangka menyusun bangunan laporan.

DISKURSUS KEMISKINAN PRODUKSI

Pembentukan Diskursus

Kemiskinan yang dikembangkan pemerintah dan diperdebatkan berkali-kali dapat dinyatakan sebagai kemiskinan produksi. Konseptualisasi *produksi* merujuk kepada akumulasi kelebihan atau *surplus* melalui organisasi produksi massal (tingkat ruangan hingga global) dalam suatu pabrik (pemilikan alat produksi oleh pemilik modal atau manajemen).

Sejalan dengan Revolusi Industri di Eropa periode 1750-1850, pengurangan kemiskinan turut berkembang. Akan tetapi, diskursus kemiskinan produksi yang berkembang di Indonesia dibentuk sebagai obyek wilayah miskin yang berisikan individu miskin melalui pidato pengangkatan Presiden Amerika Serikat, Harry S.

Truman². Pidato tersebut telah membagi wilayah maju dan miskin (Gambar 2). Pembeda penting setelah pidato Truman pada tahun 1947 ialah membesarnya diskursus pembangunan dan kemiskinan (Esteve, 1992; Rahnama, 1992). Pengelolaan pembangunan tidak hanya dilakukan dalam bentuk gotong royong di tingkat desa, melainkan kini terkoordinasi hingga tingkat nasional dan global. Pembentukan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional meluaskan diskursus kemiskinan produksi tersebut ke Indonesia sejak tahun 1993. Salah satu teks hegemonik yang menstandarisasi pembangunan seluruh dunia ialah *Millennium Development Goals*, dan teks ini mengeluarkan edisi kemiskinan selama dekade 1990-an. Pada banyak negara, terutama penerima donasi Bank Dunia, telah dikembangkan secara seragam *Poverty Reduction Strategy Paper* (Levinsohn, 2003), dan di Indonesia dikenal sebagai strategi penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional dan daerah. Perluasan diskursus kemiskinan produksi ke dalam negara dimungkinkan melalui konsep negara sebagaimana pabrik³. Pinjaman donor asing dapat dipandang sebagai investasi untuk mengembangkan program pengurangan kemiskinan.

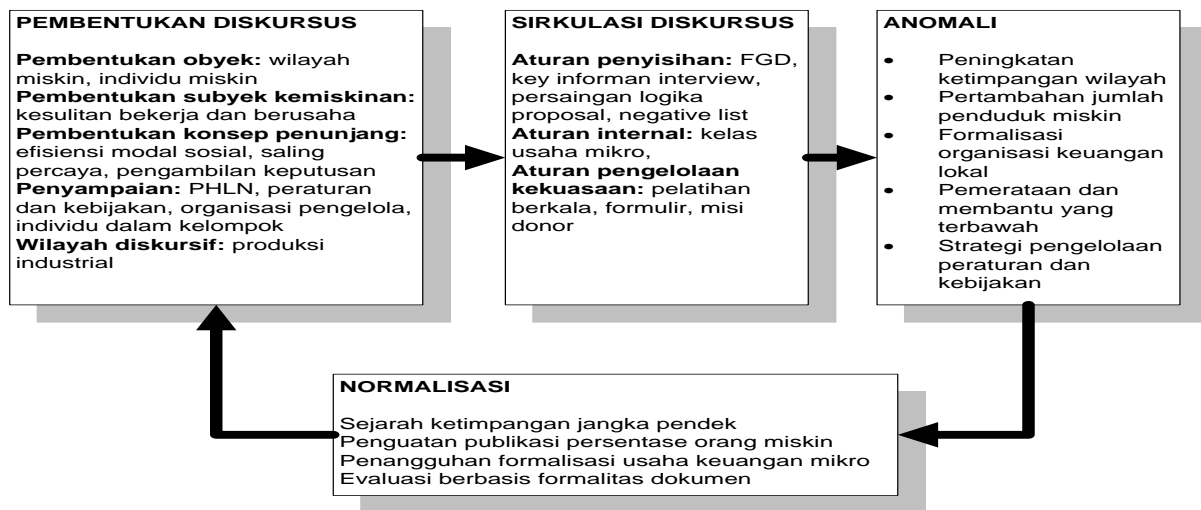
Kemiskinan menjadi masalah produksi, dan orang miskin didefinisikan sebagai agensi yang tidak mampu berproduksi. Upaya pengurangan kemiskinan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan usaha orang miskin. Konsep modal sosial dan saling percaya di antara warga desa juga dipandang sebagai mekanisme untuk meningkatkan efisiensi kerja melalui pengambilan keputusan kegiatan pengurangan kemiskinan.

Metode penguatan diskursus dilakukan melalui penyisihan golongan yang lebih tertinggal dalam persaingan proposal, wawancara khusus kepada lapisan elite (*key informant*), hingga pelembagaannya melalui keputusan bersama dalam *focus group discussion* (FGD). Kelompok yang sudah memiliki dasar berproduksi kemudian dilatih secara berkala.

² Presiden Truman mengatakan, "We must embark on a bold new program for making the benefit of our scientific advances and industrial progress available for the improvement and growth of underdeveloped areas. The old imperialism – exploitation for foreign profit—has no place in our plan. What we envisage is a program of development based on the concepts of democratic fair dealing". Dikutip dalam Esteve (1992).

³ Asosiasi negara dengan pabrik ditunjukkan dalam penjelasan UU 17/2003 tentang keuangan negara, di mana, "Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara... Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO) Pemerintah Republik Indonesia, sementara setiap menteri/pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah *Chief Operational Officer* (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan".

Gambar 2. Diskursus Kemiskinan Produksi



Anomali Diskursus

Meskipun persentase orang miskin menurun, namun jumlah mereka terus meningkat. Sejalan dengan itu, ketimpangan wilayah terus meningkat sebagaimana diindikasikan indeks gini dari 0,33 pada tahun 2000 menjadi 0,37 pada tahun 2010.

Dalam proyek pengurangan kemiskinan strategi untuk mengelola peraturan dan kebijakan persaingan antar kelompok, wilayah dan pemerintah desa, diarahkan dalam diskusi informal untuk menyetengahkan pemerataan. Disamping itu, segmentasi untuk lembaga mikro menyulitkan pengembangan kelompok pengelola buatan program yang telah memiliki aset di atas Rp200 juta, dan secara formal tergolong usaha besar. Upaya normalisasi atas anomali dilakukan melalui kajian sejarah ketimpangan jangka pendek, dengan mengedepankan teori Kuznets bahwa pembangunan lazim diikuti dengan peningkatan ketimpangan wilayah. Publikasi kemiskinan juga lebih menekankan persentase orang miskin daripada jumlah orang miskin. Hingga saat ini belum ada keputusan formalisasi usaha keuangan mikro yang telah berkembang pesat dalam program pengurangan kemiskinan. Adapun anomali interaksi informal dinyatakan sebagai variasi kebijakan lokal yang tidak mengubah berjalannya aturan formal.

PRAKTIK PENGURANGAN KEMISKINAN

Pembentukan Habitus

Habitus diarahkan untuk menghasilkan "rasa permainan", dan dalam hal ini berupa subyektivikasi kejadian-kejadian kemiskinan dan pengurangannya ke dalam refleksi individual para agensi. Formalisasi strategi dilaksanakan melalui pelatihan untuk pengelola program pengurangan kemiskinan. Bentuk formalisasi lainnya, termasuk di dalam pelatihan, ialah penyebaran dokumen-dokumen pemikiran, laporan pelaksanaan dan evaluasi hasil-hasil program pengurangan kemiskinan. Habitus juga dibentuk secara informal melalui diskusi-diskusi informal antara pengelola program dan pemanfaatnya.

Formalisasi aturan disusun dalam standardisasi kerangka pemikiran, prosedur pelatihan, perencanaan, pelaksanaan, dan kontrol kegiatan. Dokumen formal

tersusun atas strategi penanggulangan kemiskinan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dokumen kegiatan meliputi panduan pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut, berisikan standardisasi tahapan kegiatan, formulir-formulir yang harus diisi, serta hasil yang diinginkan.

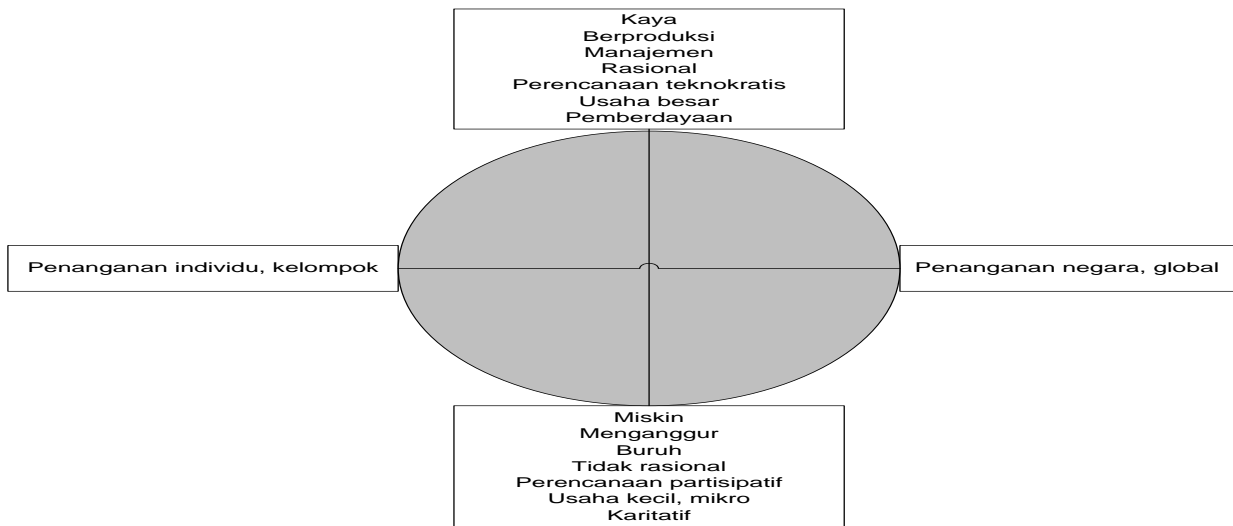
Khusus untuk pengelola kegiatan, formalisasi tindakan diajarkan dalam pelatihan. Organisasi pelatihan disusun dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa. Pelatihan dapat menunjukkan ciri khusus tindakan suatu program yang berbeda dari program lainnya, berkaitan dengan komponen, tahapan kegiatan, dan hasil yang diinginkan.

Formalisasi melalui peraturan dan panduan hendak membangun tindakan standar menurut peluang kondisi, tempat dan waktu tertentu. Perluasan habitus lebih dimungkinkan melalui refleksi atas interaksi antara pengelola program dan pemanfaatnya.

Upaya obyektivasi dari diskursus di atas dapat dinyatakan dalam dikotomi-dikotomi yang dikembangkan (Gambar 3). Sebagaimana disampaikan di atas, dikotomi penanganan individu/kelompok-penanganan negara/global diarahkan pada pembagian kerja pengurangan kemiskinan.

Dikotomi kaya-miskin memungkinkan penciptaan golongan miskin. Dikotomi berproduksi-menganggur dan manajemen-buruh mengarahkan substansi pengurangan kemiskinan untuk menguatkan kemampuan berproduksi, terutama untuk bekerja kepada pihak lain.

Dikotomi rasional-tidak rasional dan perencanaan teknokratis-perencanaan partisipatif menempatkan golongan miskin bersifat tidak rasional, sehingga metode untuk mendekatinya juga berupa perencanaan partisipatif yang lebih berbasiskan tawar menawar dibandingkan debat logis. Dikotomi usaha besar-usaha mikro/kecil dan pemberdayaan-karitatif merujuk pada segmentasi orang miskin, yaitu yang mampu berproduksi akan berkembang dalam usaha mikro/kecil, sementara yang tidak mampu berproduksi dilayani dalam program karitatif.



Gambar 3. Dikotomi-dikotomi Pembentuk Diskursus Kemiskinan Produksi

Arena Kemiskinan Produksi

Golongan miskin mencakup penduduk berpendapatan rendah. Pada beberapa program pembangunan, selain pendapatan rendah sebagai indikator utama, juga dikaitkan dengan kepemilikan sarana pendidikan dan kesehatan yang rendah. Golongan lainnya terletak pada kelompok umur produktif, kelompok umur anak-anak yang tidak bekerja, kelompok umur tua, kemiskinan pada level rumah tangga, serta pengusaha kecil dan mikro. Akhir-akhir ini juga dikembangkan pemanfaatan pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Selain itu, swasta kini masuk sebagai salah satu penyalur dana bagi orang miskin, yaitu sebagai konsultan pendamping program. Ciri pencarian untung yang mengikat secara inheren pada konsultan swasta turut terbawa dalam pendampingan masyarakat. Merekalah yang memiliki peran dan kekuasaan lebih tinggi daripada pihak lain. Dari sisi gaji yang berlipat ganda dibandingkan pegawai negeri (antara empat kali lipat pada pendamping tingkat kecamatan, hingga lebih dari lima puluh kali lipat bagi “konsultan pendamping” nasional yang sengaja direkrut dari negara donor), tugas-tugas yang lebih besar dan penuh waktu dalam program, posisi pendamping ini jauh lebih tinggi daripada lainnya. Dalam posisi yang paling penting, yaitu menandatangani persetujuan pencairan proyek dan dana kegiatan, kekuasaan konsultan pendamping bahkan hampir mutlak.

Strategi Penguasaan Diskursus

Kemiskinan sebagai bentukan sosial dapat menghadapi penentangan dari warga masyarakat lain yang menganut diskursus kemiskinan berbeda. Pada masa kini strategi diskursus kemiskinan produksi untuk menguasai diskursus lainnya yang telah berkembang di tengah masyarakat tidak seterang pembedaan konsep-konsep yang saling dipertentangkan. Upaya penguasaan diarahkan untuk menyusun habitus baru.

Pertama, dikotomi antar konsep-konsep dibaurkan, dengan cara menurunkan derajat abstraksi dari tataran filosofis atau paradigmatis menjadi sekedar administratif atau teknis. Contoh pembauran di antaranya

pertumbuhan dan pemerataan, dari semula dipertentangkan menjadi disatukan berupa *pro poor growth*, terutama ketika dipraktekkan di pedesaan.

Kedua, menggunakan nama yang sama dengan konsep yang sebelumnya berada di luar diskursus pembangunan modernis, namun diisi dengan metode pembangunan modernis. Konsep partisipasi, yang semula berasal dari golongan marxis, kemudian masuk ke dalam diskursus kemiskinan produksi, sambil menempatkan agensinya berdisposisi irasional.

Ketiga, mengembangkan konsep-konsep yang diidealkan bernilai “baik”, dan dengan ini memanipulasi idealisasi moral ke dalam program pengurangan kemiskinan. Secara terang-terangan “kebaikan” dilekatkan pada konsep *good governance*, *good village*, metode *best practice*. Idealisasi “kebaikan” juga dimasukkan ke dalam konsep modal sosial, saling percaya (*trust*).

KESIMPULAN

Diskursus kemiskinan di pedesaan merupakan bentukan pemikiran yang diikuti dengan program pengurangan kemiskinan. Diskursus ini terutama dibentuk oleh Bank Dunia, sekaligus digunakan sebagai prasyarat untuk memperoleh bantuan luar negeri.

Diskursus kemiskinan produksi dikembangkan melalui standarisasi, normalisasi dan pendisiplinan. Pengembangan habitus untuk melakukan formalisasi habitus dilakukan melalui pelatihan dan penyebaran dokumen. Pengembangan habitus secara informal dilaksanakan melalui interaksi antara pengelola dan pemanfaat program pengurangan kemiskinan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa. Arena diskursus kemiskinan produksi berisikan orang miskin, rumah tangga miskin, kelompok pemanfaat program, pengusaha mikro dan kecil, hingga warga desa secara keseluruhan. Agensi yang tidak merujuk pada orang dan keluarga miskin dapat mengucilkan golongan miskin itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvesson, M, K Sköldbberg. 2000. *Reflexive Methodology: New Vistas for Qualitative Research*. London: SAGE.
- Ananta, A. 2005. *The Negative and Positive Uses of Socio-economic Statistics*, In: V.R. Hadiz, D. Dhakidae, eds. *Social Science and Power in Indonesia*. Singapore: Equinox dan ISEAS.
- Bourdieu, P. 1977. *Outline of a Theory of Practice*. Cambridge Univ. Pr.: Cambridge, UK.
- Bourdieu, P. 1990. *The Logic of Practice*. Stanford Univ. Pr.: Stanford, California
- Bourdieu, P. 2010. *Arena Produksi Kultural: Sebuah Kajian Sosiologi Budaya*. Terjemahan The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Esteva, G. 1992. *Development*, In: W. Sachs, ed. *The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power*. London: Zed Books.
- Foucault, M. 2002a. *Menggugat Sejarah Ide*. Terjemahan The Archaeology of Knowledge oleh I.R. Muzir. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Foucault, M. 2002b. *Pengetahuan dan Metode: Karya-karya Penting Foucault*. Terjemahan dari P Rabinow, ed. *Aesthetics, Method and Epistemology: Essential Works of Foucault 1954-1984*. Yogyakarta: Jalasutra
- Foucault, M. 2002c. *Power/Knowledge: Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Terjemahan. Yogyakarta: Bentang.
- Gouda, F. 2007. *Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942*. Terjemahan Dutch Culture Overseas: Colonial Practice in the Netherland Indies 1900-1942. Jakarta: Serambi.
- Levinsohn, J. 2003. *The World Bank's Poverty Reduction Strategy Paper Approach: Good Marketing or Good Policy?* G-24 Discussion Paper Series No. 21, April 2003. New York: United Nations.
- Rahnema, M. 1992. *Poverty*, In: W. Sachs, ed. *The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power*. London: Zed Books.
- World Bank. 2000. *World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty*. Washington DC: World Bank.